

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA KEUANGAN

Rusdi Abdul Karim¹ Mursalim Mursalim²

Email :

¹ rusdiyudhani@gmail.com

² mursalim.chaling@umi.ac.id

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

² Dosen, Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the magnitude of the Influence of Accountability, Transparency and Internal Control System on Financial Performance in the Organization of Regional Devices, Revenue City of Gorontalo. The sample of research is all employees at Organization of Regional Devices, Revenue City of Gorontalo which amounted to 80 people using census method. Data analysis used multiple linear regression method. Hypothesis test results show that Accountability variables have a significant positive effect on Financial Performance at the Revenue of Gorontalo City. Transparency variable has a significant positive effect to the Financial Performance at the City Revenue of Gorontalo. Internal Control System variables have a significant positive effect on Financial Performance on the Regional Revenue of Gorontalo City.

Kata kunci: Accountability, Transparency, Internal Control Systems and financial performance

PENDAHULUAN

Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan dalam kondisi saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Diana Sari, 2012). Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah harus lebih responsif atau cepat dan tanggap.

Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah agar lebih responsif, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan *Good Governance* yaitu: (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintah daerah. Akbar (2012) mengatakan bahwa era reformasi membawa dampak tuntutan adanya akuntabilitas

(*accountability*) dan keterbukaan (*transparenci*) dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang *participative*.

Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme secara konstitusional tentang penggunaan sumber-sumber publik dan kinerjanya. Aplikasi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan (*program accountability*), pembiayaannya (*fiscal accountability*), pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya (*process accountability*) sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (*outcome accountability*). Para penyelenggara pemerintahan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam hubungannya dengan masyarakat/publik (*outwards accountability*), dengan aparat bawahan yang ada di dalam instansi pemerintahan itu sendiri (*downwards accountability*), dan kepada atasan mereka (*upwards accountability*). Bentuk transparansi dalam organisasi pemerintahan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria; adanya pertanggungjawaban terbuka; adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan; adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja (Annisanigrum, 2010)

Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurut Indriasari (2008), pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi laporan keuangan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, instansi pemerintahan diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk sistem yang tepat.

Sistem pengendalian internal memiliki beberapa elemen yang sangat penting dalam pengelolaan suatu akuntabilitas daerah, elemen-elemen tersebut adalah lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi. Salah satu dari elemen sistem pengendalian internal tersebut yaitu lingkungan pengendalian yang merupakan elemen dasar bagi kegiatan operasional suatu entitas yang aman, sehat dan dapat berkembang secara wajar. Lingkungan

pengendalian internal juga dapat membantu pengurus dan pengelola keuangan dalam menjaga asset; menjamin tersajinya pelaporan keuangan, manajerial yang akurat dan dapat diandalkan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien (Randal dan Alvin, 2012).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Pasal 31 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikutistandar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Nasution (2007). Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI).

Hasil evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di beberapa daerah menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern yang sudah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yang terdiri atas pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi

dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. (Mardiasmo, 2009).

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan praktisi. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. (Mardiasmo, 2009).

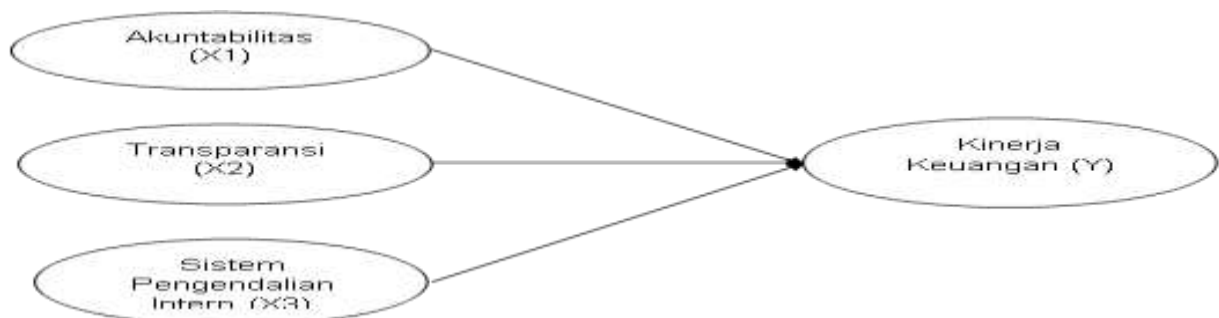
Pendapatan Daerah Kota Gorontalo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Gorontalo. Melaksanakan pembaharuan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari DPPKAD meningkatkan pendapatan daerah, Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas, memantapkan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, dan Meningkatkan pelayanan administrasi yang akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran kinerja. Dalam pengelolaan pendapatan daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian akuntansi DPPKAD Kota Gorontalo permasalahan yang dihadapi dalam lingkungan pemerintah yaitu tidak tercapainya target rencana dan realisasi dan mengakibatkan keterlambatan pelaporan keuangan dikarenakan lemahnya kualitas Sumber daya Manusia (tidak semua akuntansi). Kinerja keuangan yang baik harus disajikan berdasarkan aturan yang berlaku.

Beberapa penelitian tentang Akuntabilitas dan transparansi serta pengendalian intern yang dikaitkan dengan Kualitas Laporan keuangan seperti Ratih Muji Astuti, (2013). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Made Budi Sastra Wiguna (2015) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa (1) Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah, (2) akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah, (3) transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah, (4) pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian Tuti Herawati (2013). Hasil penelitian menemukan secara parsial, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, hanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena serta beberapa hasil penelitian maka penulis melakukan penelitian dengan: pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan pada Pendapatan Daerah Kota Gorontalo.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Berdasarkan teori agensi, digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (*principal*) yang menggunakan pemerintah (*agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat (Jensen & Meckling, 1976). Rakyat akan mengawasi perilaku pemerintah dan menyelaraskan tujuan yang diinginkan dengan tujuan pemerintah. Dalam melakukan pengawasan tersebut rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada pemerintah melalui pelaporan keuangan secara periodik. Legislatif sebagai wakil rakyat dalam mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sehingga dapat dilihat sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Semakin gencarnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan informasi hasil kerjanya kepada publik, membuat pemerintah harus melakukan banyak kegiatan guna memenuhi tuntutan tersebut. Anggaran merupakan salah satu kegiatan penting yang harus disusun untuk memaksimalkan kinerja karena anggaran dapat membantu dalam hal perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik jawaban sementara sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan
2. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan
3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pendapatan Daerah Kota Gorontalo yang sejumlah 80 orang. Dalam penelitian ini penarikan sampel menggunakan metode sensus yakni menjadikan seluruh populasi sebagai sampel karena jumlah populasi yang kurang dari 100 (Riduwan, 2007). Seluruh Instrumen yang digunakan

dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan Skala Likert. dalam penelitian ini terlebih dahulu akan dilakukan tahapan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas). Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh antara beberapa variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini variabel independen yaitu akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan system pengendalian internal (X3) dan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan (Y).

Persamaan matematis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Selanjutnya pengujian hipotesis Uji F untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan Uji T untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh yang terhadap variabel dependen dengan bantuan program SPSS.

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji regresi berganda, asumsi klasik (Uji Multikolonieritas, Uji Normalitas Data, Uji Heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (Koefisien Determinansi, Uji F dan Uji T dan seluruh Variabel dalam penelitian ini akan diukur dengan skala likert lima point dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), kurang setuju (3), setuju (4) dan sangat setuju (5), (Ghozali, Imam. 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian instrument penelitian ini baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 80 responden. Untuk uji validitas digunakan kriteria nilai t hitung > t tabel maka dikatakan valid (Sugiyono 2012) dan untuk uji reliabilitas adalah reliabel jika nilai Alpha Crombach > 0.60 (Ghozali, 2005:46). Setelah dilakukan pengolahan data, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh instrument yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliable.

Hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat uji dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Regresi Linier Berganda

Pengaruh Antar Variabel	Besarnya Pengaruh	Nilai Sig	Alpha (α)	Keputusan	Kesimpulan
Y ← X ₁ , X ₂ , X ₃	0,996	0,000	0,05	Signifikan	Diterima
Y ← X ₁	0,206	0,021	0,05	Signifikan	Diterima
Y ← X ₂	0,296	0,010	0,05	Signifikan	Diterima
Y ← X ₃	0,173	0,042	0,05	Signifikan	Diterima

Sumber: Data diolah, (2018)

Dari tabel 1, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variasi variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan pada Pendapatan Daerah Kota Gorontalo sebesar 0,996 (99,6%); variabel Akuntabilitas (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan pada Pendapatan Daerah Kota Gorontalo sebesar 0,206 (20,6%); variabel Transparansi (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan pada Pendapatan Daerah Kota Gorontalo sebesar 0,296 (29,6%). variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan pada Pendapatan Daerah Kota Gorontalo sebesar 0,173 (17,3%).

Dengan demikian dari hasil statistik, dapat disimpulkan bahwa pada hipotesis yang diajukan pada tingkat pengujian signifikan 0,05 dapat diterima (terbukti). Dari hasil estimasi pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap variabel Kinerja Keuangan, maka dapat dibentuk persamaan fungsional dalam model simultan sebagai berikut :

$$\text{Persamaan jalur : } Y = 0,191 + 0,206X_1 + 0,296X_2 + 0,173X_3 + 0,004\varepsilon$$

$$\text{Dengan } R = 0,996$$

Dari persamaan regresi linier berganda, secara sistematis pengaruh variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan maupun secara parsial terhadap Kinerja Keuangan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2 Dekomposisi pengaruh variabel independen terhadap variable dependen

Keterangan	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total (%)
X ₁ Terhadap Y	0,206	-	20,6%
X ₂ Terhadap Y	0,296	-	29,6%
X ₃ Terhadap Y	0,173	-	17,3%
Pengaruh Variabel X ₁ ,X ₂ ,X ₃ Terhadap Y			99,6%
Pengaruh Variabel luar Terhadap Y			0,4%
Total			100,0%

Sumber: Data diolah, (2018)

Dari persamaan regresi linier berganda sebagaimana tampilan table 2, dapat dijelaskan hubungan antar setiap variabel. Variabel Akuntabilitas (X₁) memiliki koefisien pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan (Y) sebesar 0,206 artinya jika Variabel Akuntabilitas ditingkatkan sebesar satu satuan, maka di ikuti dengan kenaikan Kinerja Keuangan (Y) sebesar 20,6%. Variabel Transparansi (X₂) memiliki koefisien pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan (Y) sebesar 0,296 artinya jika Transparansi ditingkatkan sebesar satu satuan, maka di ikuti dengan kenaikan Kinerja Keuangan (Y) sebesar 29,6%. Variabel Sistem pengendalian Intern (X₃) memiliki koefisien pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan (Y) sebesar 0,173 artinya jika Variabel Sistem Pengendalian Intern ditingkatkan sebesar satu satuan, maka di ikuti dengan kenaikan Kinerja Keuangan (Y) sebesar 17,3%. Nilai R pada persamaan regresi linier berganda di atas sebesar 0,996 atau 99,6% mengindikasikan bahwa variasi nilai variabel Kinerja Keuangan (Y) ditentukan oleh variasi variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern, sedangkan 4,0% ditentukan oleh variasi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis pertama (H₁) menunjukkan bahwa Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan. Besarnya pengaruh ini bukan merupakan penentu dominan pengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan secara empiris dilapangan berdasarkan sebaran kuesioner menunjukkan bahwa Pendapatan daerah Kota Gorontalo telah melaksanakan kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala. kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut, Mardiasmo (2009).

Pertanggungjawaban lembaga publik harus berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku didalam penggunaan sumber dana publik. Sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum dan kejujuran pengukurannya dengan penggunaan dana sesuai anggaran dan ketaatan pada peraturan sebagaimana, Mardiasmo (2009).

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah proses tender telah dilakukan secara fair melalui compulsory competitive tendering (CCT) atukah dilakukan melalui pola korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Mardiasmo (2009). Akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Lucy Aditya, (2014) dan Made Budi Sastra Wiguna, (2015) yang menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini DITERIMA.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menemukan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan. Besarnya pengaruh tersebut merupakan penentu dominan pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan dan secara empiris dilapangan berdasarkan sebaran kuesioner menunjukkan bahwa dominan jawaban responden berada pada kategori positif. Sebagai institusi public Pendapatan Daerah Kota Gorontalo juga sudah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Menyediakan media informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, artinya transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh

informasi yang akan diselenggarakan oleh pemerintah yaitu informasi tentang kebijakan pemerintah, proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan yang akan diselenggarakan pemerintah dan juga hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Pasaribu, 2011). Transparansi berarti ke-terbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan public, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. (Mursyidi, 2009).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Lucy Aditya, (2014) dan Made Budi Sastra Wiguna, (2015) yang menemukan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini DITERIMA,

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menemukan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan (Y). Besarnya pengaruh ini merupakan terkecil pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan dan secara empiris dilapangan berdasarkan sebaran kuesioner menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden berada pada kategori positif. Sebagai organisasi publik, Pendapatan Daerah Kota Gorontalo berkewajiban mematuhi Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan di Pendapatan Daerah Kota Gorontalo sebagaimana tujuannya sistem pengendalian intern keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan di Pendapatan Daerah di kota Gorontalo, telah memenuhi unsur-unsur sistem pengendalian intern, yakni Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Lucy Aditya, (2014) dan Made Budi Sastra Wiguna, (2015) yang menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pertama (H3) yang diajukan dalam penelitian ini DITERIMA,

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menemukan variable akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Pendapatan Daerah Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menyarankan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan system pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan agar Kinerja Keuangan pada kantor dinas Pendapatan Daerah Kota Gorontalo lebih meningkat.

REFERENSI

- Akbar, Faisal. 2012. Pemerintah Daerah dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Medan : Penerbit PT. Sofmedia.
- Annisaningrum. 2010. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan (diakses tanggal 27 Pebruari 2013 ; 4:03 PM).
- Diana Sari, 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Govindarajan 2005. Impact of participation in The Budgetary process on Manajerial Attitudes and Performance. Universilitic an contingency perspective Decision science.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS Semarang: Universitas Diponegoro.
- Lucy Aditya, 2014. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi-Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
- Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Andi Yogyakarta
- Made Budi Sastra Wiguna, 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
- Peraturan Pemerintah no.60 tahun 2008, tentang Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akun Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Randal dan Alvin (2012:322), *Jasa Audit dan Assurance*, Salemba Empat, Jakarta

Ratih Muji Astuti, 2013. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten Grobogan)*.

Riduwan, M.B.A, 2007, *Metode dan Tehnik Menyusun Tesis*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Tuti Herawati, 2013. *Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Kualitas laporan keuangan (survei pada organisasi perangkat daerah pemda cianjur)*

Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara